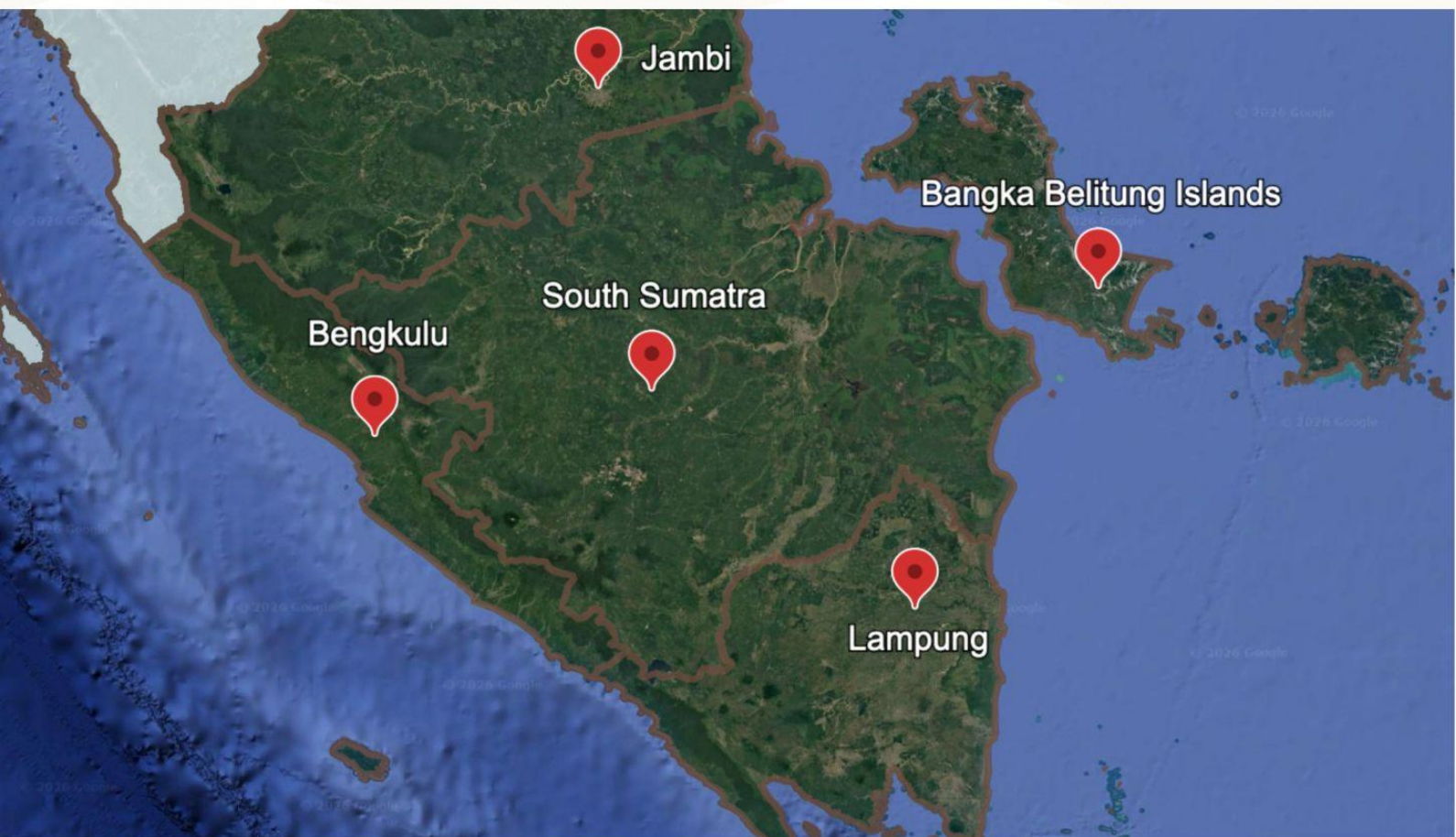


Menguatkan Gerakan Masyarakat Sipil yang Terhubung & Berkelanjutan Sumatera bagian Selatan

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik Regio Sumbagsel (Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung)
2025



Potret Demografi, Ekonomi, dan Daya Dukung Ekologis Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)

Pulau Sumatera dibagi menjadi 10 Provinsi yang membagi wilayah utara hingga selatan. Walau terdapat pembagian tersebut, seringkali dalam keseharian menemukan pembagian Pulau Sumatera terbagi jadi 2 yakni Sumatera bagian Utara (Sumbagut) dan Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel). Penyebutan 2 wilayah tersebut acap ditemukan pada pembahasan terkait regional seperti sistem ketenagalistrikan dan aglomerasi. Jika dilihat secara historis, Sumbagsel merupakan wilayah dari Kerajaan Sriwijaya sehingga dianggap memiliki kemiripan dan kedekatan budaya satu sama lain.¹ Wilayah Sumbagsel sendiri meliputi Provinsi Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Berikut jumlah penduduk di 5 provinsi tersebut:²

Provinsi	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan per km persegi
Lampung	9.522,9	284
Sumatera Selatan	8.928,5	103
Jambi	3.768,5	77
Bengkulu	2.138	106
Kepulauan Bangka Belitung	1.550,8	93
Total Sumbagsel		

Tabel 1. Jumlah Penduduk Sumbagsel per 2 Mei 2025

Secara ekonomi, Sumbagsel ditopang oleh sektor pertanian, pertambangan, kelautan, dan kehutanan. Perihal aglomerasi industri, kelima provinsi di Sumbagsel tergolong aglomerasi yang lemah dan tidak unggul jika melihat data aglomerasi industri dari tahun 2017-2023.³ Sumatera Selatan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Sumatera yakni 13,82 persen setelah Riau (22,45%). Sumatera Selatan menjadi urutan pertama jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kawasan Sumbagsel. Lampung menyusul dengan 10,30 persen dan Jambi 6,68 persen, sedangkan Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu masing-masing menyumbang 2,24% dan 2,18 persen.⁴

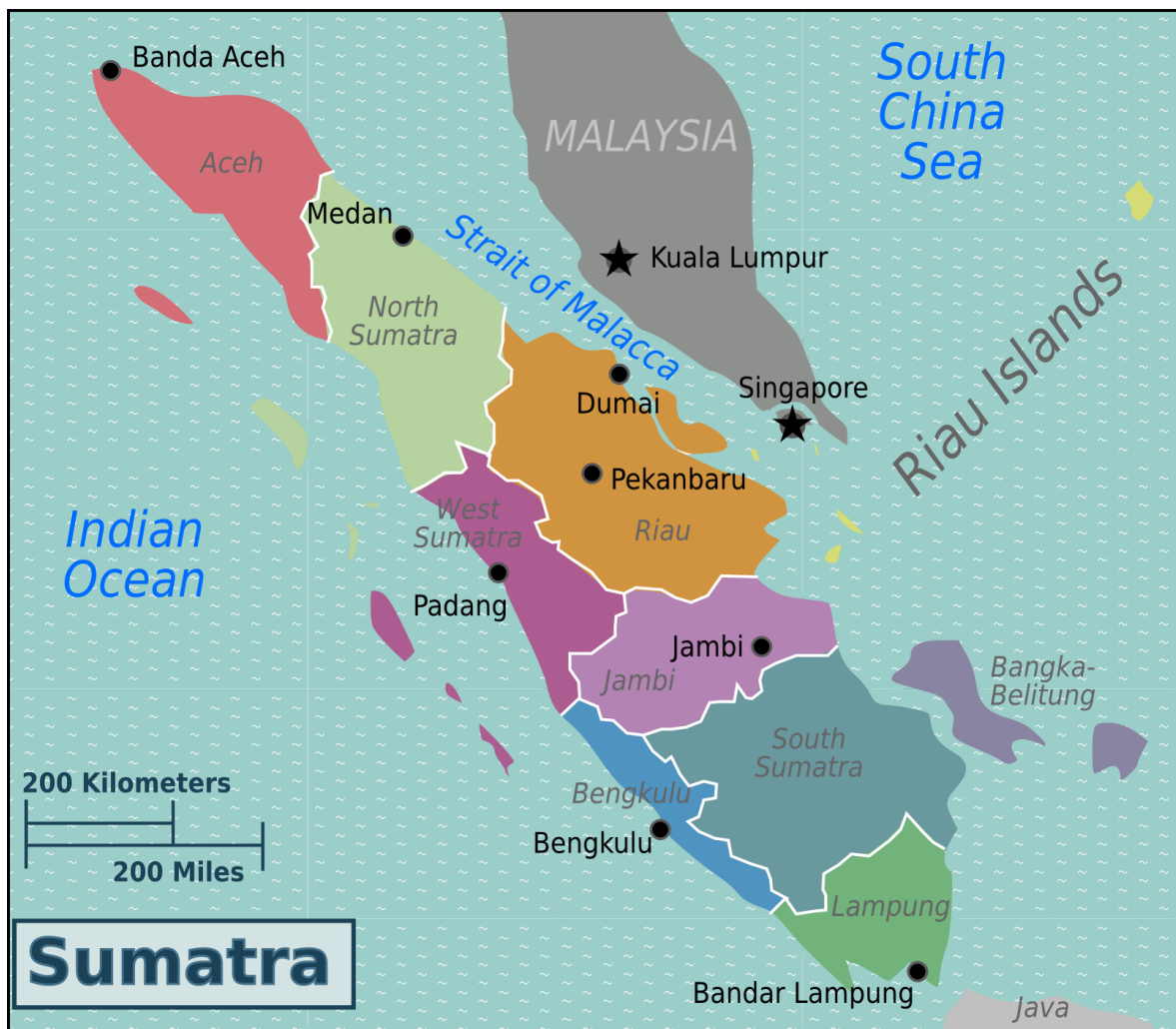
¹ Itdisway, "Sumatera Bagian Selatan Apa Saja?.....", 9 November 2023, [Sumatera Bagian Selatan Apa Saja? Berikut 5 Provinsi di Sumbagsel dan Nama-nama Kabupaten/Kota-nya](#) (diakses 28 Mei 2026)

² BPS dan Kementerian Dalam Negeri, "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk,.....", 2 Mei 2025, [Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2025](#) (diakses 29 Mei 2026)

³ Pengaruh aglomerasi industri

⁴ Muhammad Noli Hendra, "Pertumbuhan Ekonomi Sumbang Terendah di Sumatra,.....", 6 Agustus 2025, https://sumatra.bisnis.com/read/20250806/533/1899668/pertumbuhan-ekonomi-sumbar-terendah-di-sumatra-hanya-394-per-kuartal-ii2025#goog_rewarded (diakses 28 Mei 2026)

Di sisi lain, kapasitas infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah di Sumbagsel masih belum berkembang secara merata untuk menopang transformasi ekonomi kawasan. Keterbatasan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi, air bersih, serta infrastruktur logistik menyebabkan tingginya biaya distribusi, rendahnya keterhubungan antarwilayah, dan belum optimalnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dalam konteks tersebut, penguatan infrastruktur publik tidak hanya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperluas akses terhadap peluang ekonomi, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan memperkuat integrasi ekonomi kawasan Sumbagsel.⁵



Gambar 1. Peta Pulau Sumatera⁶

⁵ M. Ihsanuddin Luthfi, dkk, "Identifikasi pengaruh infrastruktur publik dan ketimpangan pendapatan per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumbagsel tahun 2013-2022", Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 3 Issue 2, 2024, hal. 241

⁶ sumber: <https://id.wikivoyage.org/wiki/Sumatera>

Kawasan Sembagsel menyimpan kekayaan ekologis yang sangat strategis bagi Pulau Sumatera maupun dunia. Di pulau ini terdapat Bukit Barisan yang merupakan Situs Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera, memanjang dari Aceh hingga Lampung dengan 40 gunung. Sumatera juga memiliki lahan rawa gambut terluas di Indonesia serta kekayaan flora dan fauna.⁷ Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang termasuk Situs Warisan Dunia seperti Bukit Barisan menyediakan habitat bagi tumbuhan dan satwa seperti harimau sumatera, gajah sumatera, *Rafflesia Arnoldii*, dll.⁸ Aktivitas industri atau ekonomi ekstraktif seperti pertambangan dan ekspansi sawit berdampak terhadap ekologi di Kawasan Sumbagsel. Persoalan agraria, energi, perubahan tata guna lahan, dan krisis lingkungan dapat menjadi ancaman seperti yang terjadi di Sumatera Selatan berupa banjir, karhutla, dll.

Penilaian Partisipatif Kondisi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik

Penilaian kondisi ruang sipil dan keterlibatan publik yang dilakukan menggunakan instrumen CIVICA yang dikembangkan oleh Civic Engagement Alliance (CEA) Indonesia untuk membaca, memahami, dan merefleksikan ruang sipil dan ruang pelibatan masyarakat sipil berbasis dinamika dan konteks pada masing-masing wilayah di Indonesia secara partisipatif dan mandiri. Instrumen ini dirancang untuk menghadirkan proses belajar, perubahan, dan kolaborasi yang tumbuh di tingkat lokal dan regional.

Melalui dua arena/blok utama yaitu Civic Space dan Civic Engagement, CIVICA membantu masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan jejaring mitra memahami tiga aspek utama, yaitu, bagaimana ruang sipil terbuka dan dimanfaatkan, bagaimana masyarakat sipil memperkuat keterlibatan publik dan bagaimana konektivitas antaraktor dan antarwilayah berkontribusi pada keberlanjutan gerakan.

Refleksi Ruang Sipil & Keterlibatan Masyarakat Sipil

Konsolidasi CEA Regio Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dilaksanakan di Lampung pada tanggal 4–5 Desember 2025. Meskipun Sumbagsel termasuk meliputi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, yang terlibat pada konsolidasi ini adalah masyarakat sipil dari

⁷ Taufik Wijaya, "Pulau Sumatera, Kerusakan Lingkungan, dan Gajah", Mongabay, 2 April 2025, <https://mongabay.co.id/2025/04/02/pulau-sumatera-kerusakan-lingkungan-dan-gajah/> (diakses 29 Mei 2026)

⁸ Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan, "Mengelola Bersama Taman Nasional Kerinci Seblat.", 14 Oktober 2019, <https://ksdae.kehutan.go.id/publikasi/berita/mengelola-bersama-taman-nasional-kerinci-seblat-ersrUGGu/> (diakses 29 Mei 2026)

Agenda ini dimulai dengan mengenalkan tentang CEA dan langsung berlanjut dengan sesi pengenalan peserta. Proses selanjutnya mengajak peserta untuk membaca konteks isu dan kewilayahan. Dalam sesi pembacaan konteks, peserta memetakan persoalan berdasarkan pendekatan isu lingkungan, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Peserta juga membaca segala tantangan yang dihadapi masyarakat sipil di wilayah Sumbagsel.



Permasalahan yang muncul dan menjadi perhatian jaringan masyarakat sipil di Sumbagsel kurang lebih terkait sengketa lahan, kriminalisasi, keselamatan aktivis, perubahan iklim dan bencana ekologi. Isu lingkungan cukup tinggi di kawasan Bukit Barisan. Persoalan sosial seperti tingginya angka perkawinan anak dan

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik di Provinsi Sumbagsel Tahun 2025

Catatan Kritis terhadap Ruang Sipil dan Keterlibatan di Sumbagsel

Penilaian, eksplorasi, dan refleksi berbasis CIVICA di Sumbagsel membuka gambaran tentang kondisi ruang sipil melalui tujuh dimensi yang saling terkait dan menopang keberadaan ruang sipil. Gambaran singkat dari refleksi terhadap tujuh dimensi dari blok Kondisi Ruang Sipil (Civic Space) dan Keterlibatan Publik (Civic Engagement) adalah sebagai berikut:

Dimensi Pengorganisasian Basis atau Komunitas

Organisasi masyarakat sipil (OMS) mendapatkan stigma negatif berupa membawa nilai liberal hingga LSM memeras masyarakat. Berbagai strategi pengorganisasian dilakukan untuk mengikis stigma tersebut, seperti pendekatan budaya, agama, keluarga, ekonomi, dan kegiatan informal yang melibatkan masyarakat secara langsung, sekaligus menempatkan warga sebagai bagian dari agenda perjuangan. Pengorganisasian juga diperkuat melalui pengakuan legal kelompok basis, pendidikan politik dan ekonomi, penguatan kapasitas produksi dan pemasaran, serta menjalankan partisipasi berbasis pendekatan interseksionalitas. Selain itu, OMS aktif membangun jejaring lintas wilayah dan sektor melalui temu rakyat, forum perempuan akar rumput, tim reforma agraria, hingga koneksi pasar dan pendanaan untuk memperkuat keberlanjutan komunitas. Namun demikian, tantangan utama masih berada pada aspek ketahanan, perlindungan, dan keberlanjutan organisasi basis. Misalnya berupa pengorganisasian masih ketergantungan pada figur tokoh atau patron.

Rekomendasi Prioritas

1. Pengelolaan distribusi pengetahuan dan kemampuan pengorganisasian di OMS yang tidak bergantung pada pimpinan.
2. Menumbuhkan kesadaran kolektif antar komunitas untuk dukungan solidaritas antar masyarakat, terutama pada situasi bencana atau ketidakadilan.

Dimensi Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

Refleksi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat sipil telah berkembang melalui berbagai mekanisme pembelajaran bersama, penguatan jejaring, dan kolaborasi lintas organisasi maupun stakeholder. Masyarakat sipil di Sumbagsel melakukan beberapa

praktik peningkatan kapasitas. Salah satunya membuat pelatihan terbuka seperti bahasa isyarat, forum pembelajaran berkala antar anggota jaringan, ruang berbagi pengetahuan antar aktivis, dan menyediakan ruang podcast sebagai kanal pengetahuan bersama. Penguatan kapasitas advokasi juga dilakukan secara kolaboratif dan berbasis bukti. Tentu agenda tersebut melibatkan kelompok masyarakat terdampak, organisasi lintas isu, akademisi, media, serta lembaga yang memiliki keahlian dan sumber daya tertentu. Pendekatan advokasi dikembangkan secara fleksibel, baik berbasis wilayah maupun kasus. Bentuknya dapat melalui momentum hari besar, audit sosial layanan publik, dan sistem rujukan penanganan kasus. Namun demikian, tantangannya berkaitan dengan mekanisme perlindungan bersifat sektoral, kasuistik, dan bergantung pada kebijakan masing-masing organisasi. Pedoman perlindungan bersama di tingkat regional belum terbentuk.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun kesadaran yang merata pada masyarakat sipil di wilayah regio Sumbagsel terkait sistem keamanan bersama.

Dimensi Konektivitas Masyarakat Sipil

Konektivitas masyarakat sipil masih berjalan melalui pendekatan berbasis isu, wilayah, dan jaringan organisasi masing-masing. Upaya pengelolaan gap generasi dilakukan melalui ruang belajar bersama, pelibatan bertahap orang muda, dan forum pertemuan antar generasi, meski perbedaan pola komunikasi dan perspektif masih menjadi tantangan. Pengelolaan data profil dan kepakaran OMS juga masih tersebar di masing-masing lembaga dan belum terhubung dalam database regional bersama. Selain itu, komunikasi antar organisasi belum memiliki mekanisme kolektif dan berkelanjutan karena forum yang ada umumnya bersifat sementara dan berbasis proyek. Kondisi ini menunjukkan bahwa konektivitas antar OMS belum terkonsolidasi secara kuat.

Rekomendasi Prioritas

1. Memperkuat konektivitas masyarakat sipil di regio Sumbagsel.
2. Menggunakan HAM atau keadilan sebagai perspektif penghubung semua isu dalam gerakan masyarakat sipil di Sumbagsel.

Dimensi Mobilisasi Sumberdaya

Masyarakat sipil belum mempunyai dana kolektif yang dikelola secara bersama. Mobilisasi sumber daya masyarakat sipil juga masih didominasi praktik yang bersifat insidental,

misalnya saat merespons situasi darurat atau aksi bersama. Beberapa organisasi mengembangkan diversifikasi pendanaan melalui usaha sosial seperti produksi pembalut kain, ecoprint, bank sampah, kebun kopi, dan usaha komunitas. Dalam relasi dengan donor, pengalaman negosiasi dengan mulai berkembang meskipun kapasitasnya belum merata dan masih menghadapi tantangan komunikasi serta posisi tawar. Jadi, terdapat organisasi yang bernegosiasi langsung dan yang berposisi sebagai sub-project dari organisasi atau jaringan nasional. Selain donor, beberapa OMS juga mulai mengakses dana CSR dan hibah pemerintah untuk kegiatan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja-kerja gerakan masyarakat sipil belum memiliki dukungan pendanaan kolektif yang kuat. Pengetahuan dan pengalaman diversifikasi sumber daya masih terbatas di beberapa organisasi dan belum terhubung sebagai kekuatan bersama dalam gerakan.

Rekomendasi Prioritas

1. Berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan dan pengembangan diversifikasi sumber daya.
2. Menemukan model pendanaan kolaboratif yang bisa dilakukan masyarakat sipil di regio/lokal.

Dimensi Regulasi Pendukung

Masyarakat sipil regio Sumbagsel menangkap berbagai regulasi pendukung di tingkat nasional dan daerah, seperti perlindungan pekerja migran (UU No.18 Tahun 2017), penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat (contoh: Perda Jambi No.8 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat), layanan inklusif, dan sanitasi. Di sisi lain, terdapat sejumlah kebijakan yang dianggap membatasi ruang sipil dan mengancam kelompok rentan, seperti perda anti maksiat dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ITE berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap aktivis.

Dalam situasi demikian, masyarakat sipil Sumbagsel menunjukkan kemampuan intervensi kebijakan melalui advokasi layanan dasar, perlindungan buruh migran, penyelesaian konflik agraria, layanan ramah komunitas, hingga pencegahan perkawinan anak. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan umumnya dilakukan melalui jaringan dan koalisi supaya mewakili beragam pandangan meskipun di beberapa titik pelibatannya berbasis isu. Kondisi ini menggambarkan ruang regulasi dan pengaruh masyarakat sipil di regio Sumbagsel sudah cukup baik. Tantangannya terletak pada adanya kebijakan diskriminatif, konsistensi ruang partisipasi, dan ketergantungan pada jejaring advokasi tertentu.

Rekomendasi Prioritas

1. Merumuskan agenda advokasi bersama sebagai ruang konsolidasi untuk menjawab isu-isu krisis dan ketidakadilan.

Dimensi Konsolidasi dan Narasi Advokasi

Konsolidasi gerakan masyarakat sipil berlangsung secara formal maupun informal sesuai dinamika wilayah masing-masing. Forum itu menjadi ruang temu komunitas, antar organisasi, dan ruang diskusi membahas isu-isu yang berkembang. Dalam advokasi, strategi membangun penerimaan publik dan mempengaruhi kebijakan melalui pendekatan lokal berupa wayang, festival budaya, tradisi adat, dan penggunaan bahasa daerah dalam program-program komunitas. Selain itu, ruang publik dan forum pemerintah dimanfaatkan untuk memperluas keterlibatan kelompok rentan dan minoritas. Hal tersebut guna memfasilitasi kelompok agar dapat menyampaikan agenda serta kepentingannya secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsolidasi gerakan dan penguatan narasi alternatif masyarakat sipil cukup kuat, terutama melalui pendekatan budaya dan perluasan ruang partisipasi yang lebih inklusif.

Rekomendasi Prioritas

1. Berkomitmen membangun ruang bersama untuk konsolidasi masyarakat sipil.

Dimensi Demokrasi Ekonomi

Mengembangkan berbagai inisiatif untuk praktik demokrasi ekonomi berbasis komunitas, diantaranya produksi ecoprint, pengelolaan kebun kopi, credit union (CU), dan pembentukan koperasi komunitas. Dari inisiatif tersebut berdampak pengembangan usaha, terutama adanya koperasi komunitas. Sebagian pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh kelompok dampingan. Beberapa model kelembagaan inklusif juga masih dalam tahap penataan dan pengembangan. Tantangannya berada pada akses pasar, penguatan branding, dan menjaga konsistensi kualitas produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi komunitas bertumbuh, namun masih berada pada tahap awal dan membutuhkan penguatan kelembagaan supaya terjadi keberlanjutan ekonomi yang lebih kuat.

Rekomendasi Prioritas

1. Belajar bersama untuk memperkaya model-model ekonomi berbasis komunitas.

Sintesis Penilaian CIVICA Sumbagsel

Sesi refleksi terhadap ruang sipil dan ruang keterlibatan menghasilkan rangkuman semua rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diterjemahkan ke dalam bentuk diagram alur sebagai berikut:



Gambar 3. Sintesis Penilaian CIVICA Sumatera bagian Selatan

Kesimpulan

Masyarakat sipil di Sumbagsel melalui konsolidasi ini dapat memetakan kondisinya berdasarkan tools penilaian tujuh dimensi CIVICA. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan utama organisasi masyarakat sipil (OMS) di regio ini terletak pada kemampuan narasi, pendekatan pengorganisasian berbasis komunitas, dan advokasi kebijakan. Sebaliknya, dimensi demokrasi ekonomi mendapat skor rendah. Hal tersebut mencerminkan lemahnya fondasi kemandirian ekonomi kolektif yang diperlukan untuk menopang keberlanjutan gerakan.

Tantangan yang mengemuka meliputi keberlanjutan gerakan, skema perlindungan aktivis, ketergantungan terhadap donor, ruang konektivitas regional, dan krisis regenerasi. Selain itu, masyarakat sipil juga dihadapkan dengan kebijakan yang tak berpihak kepentingan komunitas, proyek ekstraktif dan konflik agraria, kriminalisasi, serta kerusakan lingkungan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ruang sipil di Sumbagsel masih rentan. Untuk menjawab tantangan ini, para peserta bersepakat meneguhkan komitmen berjejaring dalam kerangka CEA. Agendanya membangun keberlanjutan gerakan melalui konektivitas lintas isu dan provinsi, mendiversifikasi sumber pendanaan, serta menjadikan perspektif HAM dan keadilan sebagai titik temu bersama.